



Agus: Saya Bantu Asal Sesuai Aturan

Pasca Warga Tolak Tanah Gratis

SINGARAJA - Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana akan memilih memberikan bantuan secara aturan main, kepada warga yang tergabung dalam Kelompok Nelayan Astiti Amerta, pasca tempat tinggalnya diratakan saat eksekusi, 25 April silam. Bantuan hanya akan diberikan kepada warga yang dimungkinkan menerima bantuan, sesuai dengan aturan main yang ada.

Hal itu diungkapkan Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, saat ditemui wartawan. Agus menegaskan pihaknya memberikan bantuan bedah rumah dan lahan pribadi, atas dasar kemanusiaan. Bantuan juga hanya diberikan kepada warga yang memang benar-benar tidak memiliki lahan dan rumah.

Agus mengaku, awalnya ia merelakan lahan pribadinya seluas 15 are yang berjarak sekitar dua kilometer dari tepi Danau Tamblingan, karena pertimbangan kemanusiaan. "Tapi kalau ditolak, ya

bagaimana," kata Agus. Mantan Ketua Komisi III DPRD Bali itu juga mengaku sudah menerima laporan mengenai permintaan 22 kepala keluarga dalam kelompok nelayan, yang menuntut bantuan bedah rumah. Hanya saja memberikan bantuan kepada seluruh anggota kelompok nelayan, tak bisa dilakukan, karena ada aturan yang harus ditaati. "Pemerintah itu *nggak* bisa memberikan bantuan atas dasar asas kebersamaan. Ada parameternya. Ada juklak dan juknisnya. *Masak* warga yang

mampu secara materi dan tidak layak sesuai aturan, harus kami bantu juga? Menyalahi aturan itu namanya," tegasnya.

Rencananya, Pemerintah Kabupaten Buleleng bersama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali, akan mengembalikan fungsi Taman Wisata Alam Buyan-Tamblingan, sesuai fungsi awalnya. Yakni fungsi konservasi, daerah resapan air, dan kawasan spiritual. Pemerintah mengaku sudah menyoroti BKSDA Bali dan meminta tidak ada zona peman-

faatan didalam kawasan TWA Buyan-Tamblingan. Sehingga tak ada fasilitas akomodasi pariwisata yang dibangun di sekitar Danau Tamblingan.

Seperti diberitakan sebelumnya, sembilan kepala keluarga dalam Kelompok Nelayan Astiti Amerta, telah disiapkan menerima bantuan rumah dan lahan. Hanya saja bantuan itu ditolak, dan mereka meminta agar seluruh anggota kelompok nelayan mendapat bantuan bedah rumah, meski tak semuanya layak sebagai penerima. (eps/gup)

Edisi : Jumat, 8 Mei 2015

Hal : 33



Radar Bali

TERBENGKALAI:
Gedung aset
Pemkab
Jembrana
yang ada di
Jalan Udayana
tampak dipenuhi
tumbuhan liar.



M BASIR/BALI EXPRESS

Gedung Pemkab Tidak Terurus

NEGARA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jembrana rupanya memiliki banyak aset yang terbengkalai, selain aset berbentuk barang yang saat ini berada di tempat pembuangan akhir (TPA) Peh, Desa Kaliakah, beberapa tanah dan gedung milik Pemkab juga terbengkalai tidak terurus. Seperti beberapa gedung yang be-

rada di Jalan Udayana, depan Kejaksaan Negeri (Kejari) Negara. Di sana terdapat tiga gedung yang terlihat terbengkalai. Kondisinya sangat memprihatinkan. Pintu gerbang ditumbuhi rumput liar menjalar, halaman gedung juga sangat kotor. Beberapa bagian gedung tampak sudah kusam ■

► Baca *Gedung...* Hal 35

Edisi : Jumat, 8 Mei 2015

Hal : 21



Radar Bali

Sambungan ...

Bekas Kantor BKSDA Penelokan Dipenuhi Semak



PENUH SEMAK: Bekas kantor BKSDA Penelokan ini terbengkalai sejak 2010 lalu.

■ GEDUNG...

Sambungan dari hal 21

Kepala Bagian (Kabag) Perlengkapan Pemkab Jembrana I Made Aryana membenarkan tiga gedung tersebut aset Pemkab Jembrana. Namun, saat ini dipinjam pakai oleh beberapa instansi. Gedung paling timur, sempat dipinjam PNPB pada tahun 2014 lalu. Karena program sudah selesai ditinggalkan begitu saja. "Tapi, setelah pinjam belum ada penyerahan lagi," jelasnya saat dikonfirmasi kemarin (7/5).

Aryana mengakui saat ini memang banyak aset Pemkab berupa bangunan yang terbengkalai tidak terawat. Seperti gedung sebelah barat gedung PNPB juga tidak kalah memprihatinkan. Gedung bercat warna kuning tersebut pintu gerbangnya sudah ditumbuhi rumput liar. Kondisi di luar gedung rumput liar sudah cukup tinggi, di malam hari juga tidak ada lampu penerangan. Kondisi yang sama juga terlihat di gedung bekas kantor Panwaslu Negara yang juga berada di lokasi yang sama.

Gedung tersebut menurut Aryana, digunakan oleh Lembaga Konsultasi Kesehatan Keluarga (LK3) Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana. "Sudah saya hubungi penanggungjawabnya, katanya masih digunakan," ungkapnya.

Atas kondisi yang suah tidak terawat tersebut, Aryana sudah meminta untuk segera dibersihkan karena gedung tersebut aset daerah. Pihaknya juga akan meminta pada pihak yang menggunakan atau

pinjam pakai, jika sudah tidak digunakan lagi agar segera dikembalikan. "Kalau tidak dipakai dikembalikan, biar tidak terbengkalai," terangnya.

Sedangkan bangunan Kantor Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) yang berlokasi di Penelokan, Kintamani, terlihat sangat memprihatinkan. Pasalnya, bangunan aset provinsi itu dibiarkan terbengkalai dan dipenuhi semak-semak.

Bangunan kantor BKSDA yang berlokasi di barat jalan Bangli-Kintamani, itu memang sudah lama dikosongkan dan tidak dirawat. Rumput dan pepohonan liar tumbuh subur menutupi areal kantor sehingga hanya bagian atap yang kelihatan. "Kantor itu sudah lama kosong dan tidak pernah ada yang membersihkan," ujar seorang warga.

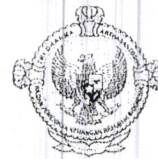
Kepala BKSDA Wilayah II Bali Ketut Catur Marbawa ketika dikonfirmasi, kemarin mengatakan kantor tersebut awalnya me-

mang kantor BKSDA. Namun, karena dipindahkan ke Gianyar, maka kantor yang di Penelokan itu tidak digunakan. Kemungkinan kantor itu mulai dikosongkan sekitar tahun 2010. Sebab, ketika dirinya mulai berugas tahun 2012 kantor itu sudah dalam keadaan kosong. "Selain karena posisinya kurang strategis, kantor itu tidak digunakan karena di wilayah tersebut kesulitan air bersih dan atapnya banyak yang rusak," ungkapnya.

Agar aset provinsi itu tidak terus terbengkalai, kata Catur, tahun depan rencananya akan direhab. Setelah selesai direhab, kantor tersebut akan digunakan sebagai kantor Resort Penelokan. "Saat ini kantor Resort Gunung Batur dan Penelokan jadi satu. Nanti, akan kita pisah dan kantor yang kosong itu akan kita gunakan untuk Resort Penelokan," jelasnya. Untuk kebutuhan air karena di wilayah tersebut tidak terlayani PDAM kemungkinan akan membeli air. (bas/nom/yes)

Edisi : Jumat 8 Mei 2015

Hal : _____



Kejati Panggil Dua Kabag

Kasus Pembagian PHR Badung

- Kejati Bali memanggil dua Kabag keuangan
- Mereka yang dipanggil adalah Kabag Keuangan Bangli Ketut Nurjana dan Tabanan Wayan Arimbawa.
- Sebelumnya Kejati Bali sudah memanggil anggota DPRD Badung Nyoman Sentana.
- Kasus ini sendiri terkait pembagian PHR (pajak hotel dan restoran) dari Badung kepada enam kabupaten di Bali tidak sesuai peruntukan.



Terkait Dana Bagi Hasil PHR Badung

DENPASAR - Tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali terus mendalami dugaan penyimpangan dana bagi hasil dari Pajak Hotel dan Restoran (PHR) Badung ke enam kabupaten di Bali. Kabar terbaru, kemarin (7/5) Kejati Bali memanggil dua

pejabat eselon yakni kepala bagian (Kabag) Keuangan Kabupaten Tabanan dan Bangli, sebagai penerima bagi hasil PHR.

Informasi yang berhasil dihimpun dari sumber di lingkungan Kejati Bali, Kabag Keuangan Bangli Ketut Nurjana dan Tabanan Wayan Arimbawa, dipanggil sekitar pukul 10.00 untuk dimintai keterangan dan membawa dokumen-dokumen ■

► *Baca Kejati... Hal 35*



Radar Bali

Sambutan - . . .

Sidang

Wayan Candra

■ KEJATI...

Sambungan dari hal 21

berkaitan dengan pembagian pajak yang didapat dari hasil PHR Badung. Rencananya, semua penerima pembagian PHR Badung akan dipanggil untuk menjelaskan proses masuknya dana berupa hibah, itu serta dimanfaatkan untuk kegiatan apa. Sehingga diketahui, apa sudah sesuai dengan maksud dan tujuan dari pembagian PHR itu atau tidak. Hal itu karena berkaitan dengan uang negara di dalam APBD Badung.

Ditambahkan sumber itu, terkait selisih pelaporan dalam laporan pertanggungjawaban APBD menyangkut bagi PHR ini, masih didalami lagi sambil menunggu data-data dari sumber di Badung. Baik dari Nyoman Sentana dan

sumber yang lain.

Sementara itu, penyelidikan tentang penyimpangan pembagian PHR Kabupaten Badung ke kabupaten/kota di Bali, dimulai dengan memanggil anggota DPRD Badung Nyoman Sentana oleh Kejati Bali, Senin lalu (4/5).

Sementara itu, penyidikan kasus dugaan *mark up* pengadaaan lahan untuk gedung FKOP Undiksha Singaraja seluas 15 hektare terus bergulir di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali. Bahkan, dari perkembangan terbaru korp Adiyaksa, ini tengah membidik sejumlah orang penting di lingkungan Undhiksa. Tak hanya itu. Tim penyidik dari Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Bali tengah fokus memeriksa dua orang yang diduga ikut terlibat. Sumber koran ini

menyebutkan, mereka adalah mantan rektor Undiksha Singaraja dan ketua perencanaan. Bahkan, keduanya juga dikabarkan tengah dibidik menjadi tersangka dalam kasus yang diduga merugikan negara hingga miliaran rupiah.

Sedangkan informasi di lingkungan Kejati Bali, salah satu penyidik di lingkungan Kejati Bali membantah jika ada penetapan tersangka baru. "Untuk saat ini belum ada penetapan TSK (tersangka) baru. Termasuk pemeriksaan, kami masih dalam proses pengumpulan bukti dan masih menunggu ekspos," kata salah satu penyidik di lingkungan Kejati Bali dan mewanti-wanti namanya tidak dikorbankan.

Sedangkan sidang dugaan korupsi, gratifikasi dan *money laundry* (pencucian uang)

dengan terdakwa mantan Bupati Klungkung I Wayan Candra yang rencananya digelar di Pengadilan Tipikor Denpasar, kemarin (7/5) kembali ditunda. Sidang ditunda karena Ketua Majelis Hakim Hasoloan Sianturi berhalangan hadir.

Hakim *ad hoc* Sumali menyatakan menunda sidang karena ketua majelis hakim berhalangan hadir. "Ketua majelis masih berhalangan karena ada acara di Jakarta. Sidang akan ditunda hingga Rabu (13/5) pekan depan," jelasnya.

Agenda sidang kemarin rencananya akan memeriksa saksi I Gusti Ayu Sri Wahyuni terkait pembuktian kepemilikan salah satu kantor di tower Agung Podomoro Land, Jakarta. Namun, dalam sidang Sri Wahyuni juga tidak terlihat. Tim JPU sendiri

mengatakan saksi Sri Wahyuni masih berhalangan hadir karena masih dalam perawatan usai melahirkan. "Kami akan hadirkan kembali Rabu depan," ujar JPU.

Selain menghadirkan saksi Sri Wahyuni, dalam sidang kemarin juga rencananya memeriksa Halim Sunanda. Mantan hakim ini disebut sempat dikatakan melakukan transaksi pembelian tanah dengan Candra di Desa Kutuh, Kuta Selatan, Badung. Dalam BAP dijelaskan jika Halim menyerahkan uang

Rp 1,25 miliar kepada Candra sebagai kompensasi tanah miliknya. JPU sendiri menganggap transaksi ini sebagai tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Sedangkan pengacara terdakwa, Warsa T. Bhuwana yang ditemui usai penundaan sidang mengatakan jika transaksi yang dilakukan Candra dan Halim tersebut dilakukan sebelum Candra menjadi bupati Klungkung. "Kalau ini dijadikan TPPU kan tidak benar. Apalagi ada perjanjian jelas antara

kedua belah pihak," terangnya.

Sidang dugaan korupsi, gratifikasi, dan pencucian uang dengan terdakwa I Wayan Candra ini sendiri sudah memeriksa sekitar 120 saksi. Dalam dakwaan jaksa, mantan bupati Klungkung dua periode, ini dijerat 3 pasal berlapis yaitu dugaan korupsi dalam pembangunan Dermaga Gunaksa serta dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) selama menjabat sebagai bupati Klungkung dari tahun 2003 hingga 2013. (pra/yes)

Edisi : Jumat, 8 Mei 2015

Hal : _____



Radar Bali

Setengah, Sesuai Perencanaan

Ruang Kelas Terbengkalai di Busungbiu

SINGARAJA - Pembangunan ruang kelas di SMPN 5 Busungbiu yang diketahui terbengkalai, ternyata memang dibangun setengahnya saja. Ruang kelas itu dibangun tanpa atap, tanpa finishing, dan pemasangan lantai. Tak heran jika kemudian ruang kelas itu terbengkalai dan tak pernah digunakan selama bertahun-tahun.

Konon dalam perencanaan awal, pembangunan ruang kelas tersebut memang non finishing, dan hanya terdiri atas pondasi, tembok, serta kusen pintu dan jendela, sesuai dengan petunjuk dari pemerintah pusat. Sementara untuk atap, *fin-*

ishing, serta pemasangan lain, tak dicantumkan. Kepala Dinas Pendidikan Buleleng Ni Wayan Lugrahini mengatakan, sebenarnya bukan hanya di SMPN 5 Busungbiu saja yang terbengkalai. Namun masih ada lagi beberapa sekolah lain yang terbengkalai ruang kelasnya.

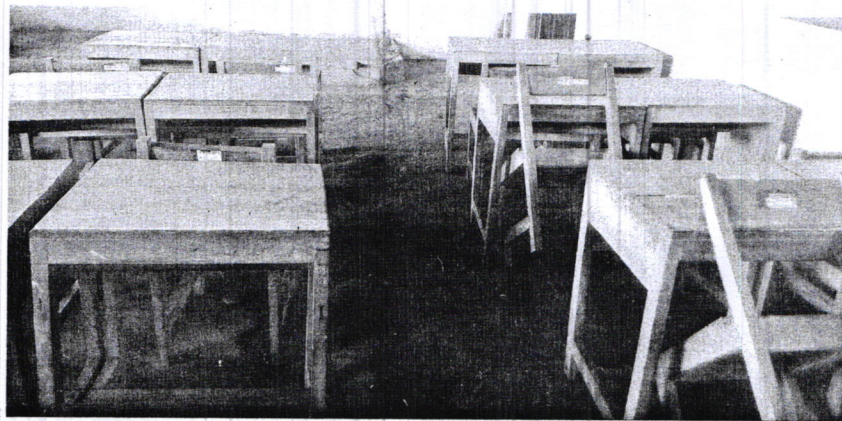
"Sebenarnya itu dibangun tahun ajaran 2010-2011. Ada 35 unit pembangunan kelas, empat laboratorium, dan tiga perpustakaan. Perencanaan awalnya memang begitu, *non finishing*," kata Lugrahini yang ditemui di Lobi Atiti Wisma Kantor Bupati Buleleng, Kamis (7/5). Lugrahini mengklaim telah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Buleleng, sehingga Bappeda Buleleng dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan ruang

kelas. Khusus untuk perbaikan, rencananya akan diluncurkan pada tahun 2016 mendatang, sehingga seluruh bangunan yang *nungkok* itu, bisa diselesaikan.

Sedangkan untuk pembangunan ruang kelas belajar lainnya, mantan Kabag Organisasi Setda Buleleng itu akan melakukan pengecekan secara mendetail, terutama dalam penyusunan *detail engineering design* (DED). Sehingga tidak ditemukan lagi bangunan yang *nungkok*.

Sebelumnya diberitakan, di SMPN 5

Busungbiu, terdapat tiga ruang kelas belajar yang belum selesai pembangunannya. Ketiga ruang kelas itu tidak di-*finishing*, tidak dilantai, dan tidak terdapat atap. Namun sekolah tetap memanfaatkannya untuk pelajaran agama dan pembinaan klub mata pelajaran. (eps/gup)



NON FINISHING: Ruang kelas SMPN 5 Busungbiu dalam perencanaan awal memang dibangun tanpa lantai dan atap.

Edisi : Jumat, 8 Mei 2015

Hal : 27